

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN
KARAKTER MENURUT PEMIKIRAN
UDIN S. WINATAPUTRA**

(Diterima 01 April 2021 ; direvisi 19 April 2021 ; disetujui 30 April 2021)

Wahyudin Noe¹, Hasmawati², Nur Rumkel³

^{1,2} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Unkhair

³ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Unkhair

*email: wahyudinnoe@unkhair.ac.id; hasmawaty2021@gmail.com;
nurrumkel42@gmail.com;*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kepedulian peneliti terhadap fenomena dekadensi moral siswa yang disinyalir merupakan salah satu dampak dari globalisasi yang bebas nilai, seperti hedonis, seks bebas, miras, narkoba, tawuran, *bullying*, dsb. Kondisi demikian menjadi perhatian serius bagi dunia pendidikan khususnya lembaga sekolah yang berperan sebagai wahana psiko-pedagogis dan sosio-pedagogis dalam membentuk karakter yang baik (*good character*) bagi siswa. Pembentukan karakter siswa dilakukan melalui pembiasaan (*habituation*) dalam pergaulan sehari-hari maupun melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pemikiran Udin S. Winataputra selaku pakar dalam bidang *citizenship education* dengan sebuah judul penelitian yaitu PKn sebagai wahana pendidikan karakter menurut pemikiran Udin S. Winataputra.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan sejauhmana PKn dapat berfungsi sebagai pendidikan karakter. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang menggunakan berbagai literatur, buku, dan referensi lainnya sebagai objek utama. Data penelitian ini diperoleh dari data-data kepustakaan lalu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasilnya menjelaskan bahwa PKn dikatakan sebagai wahana pendidikan karakter karena didasarkan pada kajian Udin S. Winataputra yang berkaitan dengan pengembangan karakter warganegara yang meliputi, yaitu: 1) pendidikan budi pekerti sebagai prakonsepsi pendidikan kewarganegaraan, dan 2) pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter.

Kata Kunci: *Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter, Udin S. Winataputra*

ABSTRACT

This research is motivated by the researcher's concern for the phenomenon of student's moral decadence which is allegedly as one of the impacts of value-free globalization, such as hedonism, free sex, alcohol, drugs, brawl, bullying, etc. This condition is a serious concern for the world of education, especially school institutions that have a role as a model psycho-pedagogical and socio-pedagogical in forming a good character for students. The forming of student's character is conducted through habitual daily intercommunication or by learning process of civic education in the classroom. Therefore, the author is interested in reviewing deeper thought of Udin S. Winataputra as an expert in citizenship education with a research title, civic education as a mode for character education according to Udin S. Winataputra's thought. The purpose of this research is to do describe to what extent civic education can function as character education. This research used literature study, a study that used various literature, books, and other references as main object. The research data were obtained from library data then analyzed using content analysis techniques. The result explained that civic education was said as a mode for character education because it was based on Udin S. Winataputra's study that related to the development of citizen character which includes: 1) character education as a preconception of civic education, and 2) civic education as a mode for character education.

Keywords: *Civic Education, Character Education, Udin S. Winataputra*

PENDAHULUAN

Kemerosotan dan bahkan merusak moral di kalangan siswa, seperti hedonis, seks bebas, miras, narkoba, *bullying*, tawuran, dan lain sebagainya, merupakan permasalahan klasik sejak dulu hingga sekarang. Hal itu perlu mendapat perhatian dari para *stakeholder* dari berbagai kalangan antara lain akademisi/pendidik, tokoh masyarakat, LSM pendidikan, maupun pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menguatkan peran sekolah dalam mengatasi permasalahan klasik tersebut. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2012) bahwa “peranan sekolah sebagai wahana psikopedagogis dan sosio pedagogis berfungsi sebagai pendidik moral dan menjadi semakin penting, pada saat dimana hanya sebagian kecil anak yang mendapat pendidikan moral dari orang tuanya dan peranan lembaga keagamaan semakin kecil”. Sekolah memiliki beban moral sekaligus sebagai tumpuan masyarakat dalam membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Karakter yang baik (*good character*) menurut Lickona (2013) adalah “perpaduan dari pengetahuan, sikap, dan perilaku serta keterampilan yang bernilai

dan bermoral. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik”.

Sekolah sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan karakter siswa, seperti bersikap demokratis terhadap pandangan yang berbeda, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air, kepatuhan terhadap aturan sekolah, sopan-santun, jujur, tanggung jawab, menjaga kebersihan, disiplin, dan menjaga kerapian dalam berpakaian, sekaligus sebagai upaya mencegah meluasnya kerusakan moral siswa. Dalam istilah Aristoteles bahwa “karakter yang baik sebagai kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri seseorang dan orang lain” (Lickona, 2013).

Pembentukan karakter di sekolah perlu dikembangkan melalui pembiasaan (*habituaasi*) dalam pergaulan siswa dan melalui proses pembelajaran di kelas. Salah satu mata pelajaran yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter siswa yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn dalam domain kurikuler diposisikan

sebagai program pendidikan karakter yang memiliki posisi dan peran dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa kepada peserta didik. Menurut Djahiri (2006) bahwa “PKn merupakan program pendidikan/pembelajaran yang secara programatik-prosedural berupaya memansuikan (*humanizing*) dan membudayakan (*civilizing*) serta memberdayakan peserta didik/siswa (diri dan kehidupannya) supaya menjadi warga negara yang baik”. Hal senada dikemukakan Soemantri (2001) bahwa “PKn diselenggarakan guna melatih peserta didik/siswa untuk berpikir kritis, analitis, berpikir dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Indikator keberhasilan PKn dalam pembentukan karakter baik siswa terlihat dari sikap dan perilaku ketika memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan orang lain dimana dilakukan secara demokratis dan bertanggung jawab.

Selain domain kurikuler, PKn juga berada pada domain sosial-kultural dimana PKn berada ditengah masyarakat yang berperan strategis dalam mengembangkan karakter masyarakat. Karakter yang unggul baik dalam ilmu

pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan teladan dalam sikap dan perilaku yang dilandaskan pada nilai dan moral bangsa. Menurut Winataputra (2015) bahwa “PKn dalam berbagai konteks mempunyai visi sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan dalam berbagai konteks”. PKn mendorong masyarakat untuk turut serta dalam membangun kehidupan yang lebih adil dan beradab, sebagaimana pernyataan Winataputra dan Budimansyah (2012) bahwa “kedudukan PKn sebagai pendidikan nilai merupakan suatu kebutuhan sosiokultural yang jelas dan mendesak bagi kelangsungan kehidupan yang berkeadaban”.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan mengkaji lebih jauh pemikiran Udin. S. Winataputra dalam melihat pendidikan karakter dari perspektif PKn dengan sebuah judul penelitian yakni “Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Karakter menurut Pemikiran Udin. S. Winataputra”. Sengaja peneliti memilih Udin S. Winataputra karena beliau merupakan

pakar kajian *citizenship education* yang mempresentasikan kajian pendidikan karakter, dimana melihat PKn sebagai disiplin ilmu yang tidak saja berada pada domain kurikuler sebagai mata pelajaran di sekolah yang berfungsi membentuk karakter peserta didik, namun juga melihat PKn berada pada domain sosial-kultural yang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan menurut Hadi (1989), “jenis penelitian untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti”. Adapun langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Kuhlthau (Mirzaqon dan Purwoko, 2017), yaitu: “1) pemilihan topik, 2) eksplorasi informasi, 3) menentukan fokus penelitian, 4) pengumpulan sumber data, 5) persiapan penyajian data, dan 6) penyusunan laporan”.

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data penelitian berupa pengumpulan data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka disini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik (Muhadjir, 1998). Setelah data dikumpulkan maka data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data (Muhadjir, 1998). Analisis tersebut dilakukan dengan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan (Serbaguna dalam Mirzaqon dan Purwoko, 2017).

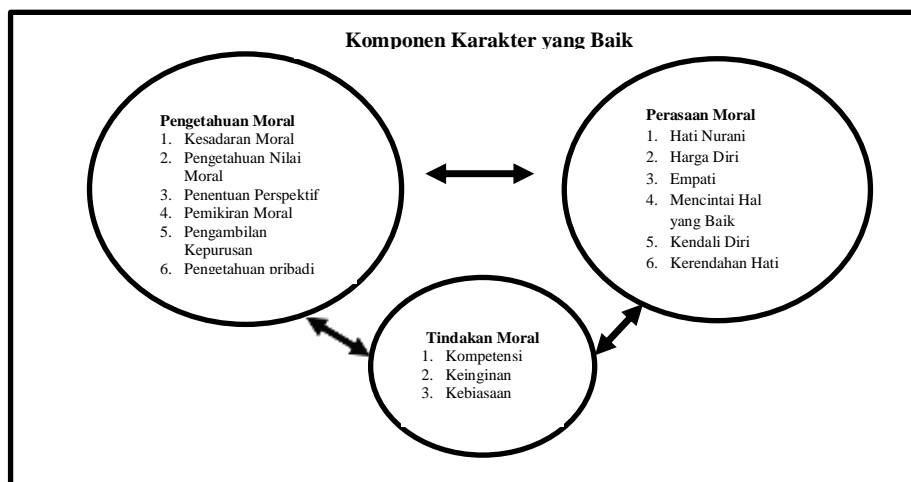
HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu “*to mark*” atau “untuk menandai” (Wynne, 1991). Menurut Dewantara (2013), “karakter, watak, budi pekerti adalah bulatnya jiwa manusia atau bersatunya gerak fikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang lalu menimbulkan tenaga”. Sedangkan Gronbach (1977), “*character is not commulation of*

separate habits and ideas. Character is an aspect of the personality, beliefs, feelings, and actions, are linked; to change character is to reorganize the personality". Karakter sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan antara kepribadian, kepercayaan, perasaan, dan tindakan dari seseorang.

Seorang pakar pendidikan karakter yaitu Thomas Lickona telah membagi karakter menjadi tiga bagian yaitu pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral*

behavior). Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik-kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan (Lickona, 2013). Dimana ketiga bagian karakter tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain sehingga membuahkan karakter yang baik (*good character*). Adapun komponen karakter yang baik terlihat dari gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Diagram Komponen Karakter yang Baik (Lickona, 2013)

Adapun kajian karakter dalam perspektif pendidikan atau dikenal pendidikan karakter telah banyak dibahas para ahli. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu berdasarkan nilai dan moral. Dalam istilah Lickona (2015), bahwa

“pendidikan karakter, dipahami benar, bertujuan untuk mengembangkan kepribadian. Seluruh siswa lebih baik, masyarakat lebih baik”. Sedangkan pendapat Elkind dan Sweet (2004), pendidikan karakter adalah “*character education is the deliberate effort to help*

people understand, care about, and act upon core ethical values". Dengan kata lain pendidikan karakter merupakan upaya yang disengaja secara sadar dan terprogram untuk membantu orang-orang memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika.

Dalam konteks lebih luas, pendidikan karakter sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa kepada diri warganegara agar memiliki nilai-nilai religius, nasionalis, produktif dan kreatif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Kemendiknas BP3K, 2010). Adapun nilai-nilai karakter bangsa tersebut diantaranya: nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung-jawab (Kemendiknas BP3K, 2010).

Pendidikan karakter bangsa di lingkungan sekolah ditanamkan dalam suatu proses pembelajaran dan pembiasaan (habitiasi) dalam pergaulan sehari-hari. Terdapat beberapa alasan dimana sekolah memerlukan pendidikan

karakter sebagaimana pernyataan Lickona (2013), yaitu sebagai berikut:

(1) peran sekolah sebagai pendidikan nilai/karakter menjadi semakin penting ketika jutaan anak mendapatkan sedikit pengajaran moral dari orang tua, masyarakat, atau lembaga keagamaan; (2) proses penghubungan nilai dan sosialisasi; memberikan pendidikan nilai/karakter kepada generasi muda merupakan fungsi penyelamatan dan perbaikan kehidupan dan perkembangan manusia; dan (3) keberadaan guru yang baik akan bermakna apabila pendidikan karakter/moral, termasuk pembentukan sikap bermasyarakat dengan kerendahan hati sebagai bagian dari materi utama pendidikan di sekolah.

Oleh karena itu salah satu mata pelajaran yang berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa kepada peserta didik yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membangun karakter peserta didik agar mencintai negara dan tanah airnya sendiri, sebagaimana pernyataan Ljunggren (2014) bahwa "PKn merupakan salah satu bidang kajian ilmu yang memiliki peran yang signifikan dalam membangun karakter

bangsa (*nation and character building*). Di negara-negara yang berpaham demokrasi, PKn dijadikan sebagai alat untuk memperkuat identitas kewarganegaraan seseorang”. Hal tersebut diperkuat pernyataan Winataputra (2006) bahwa “secara filosofis, PKn memegang misi suci (*mission sacre*) untuk pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab”.

Untuk memahami lebih jauh seperti apa peran PKn sebagai wahana pendidikan karakter dalam pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, maka penulis mencoba untuk mendalami dan mengkaji pemikiran dari Udin S. Winataputra selaku pakar dibidang *citizenship education*. Adapun kajian yang dimaksud antara lain:

1. Pendidikan Budi Pekerti sebagai Prakonsepsi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Udin S. Winataputra

Istilah pendidikan budi pekerti dikenal terlebih dahulu dibandingkan pendidikan karakter atau pendidikan kewarganegaraan (PKn). Menurut

Winataputra (2015) bahwa “PKn baik secara nomenklatur program kurikuler maupun sebagai bidang kajian keilmuan belum dikenal sampai dengan tahun 1960, saat mulai diperkenalkannya mata pelajaran *Civics* dalam kurikulum pada tahun 1962. Program kurikuler yang bermuatan pendidikan etika berkehidupan bermasyarakat saat itu adalah Budi Pekerti/Kelakuan”. Dengan kata lain PKn dilihat dari perspektif keilmuan merupakan bagian dari mata pelajaran *civics*, sedangkan PKn dalam perspektif pendidikan karakter secara inheren termasuk ke dalam mata pelajaran pendidikan budi pekerti.

Pendidikan budi pekerti dilihat dari aspek sejarah pertama kali diperkenalkan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada aspek pembentukan karakter peserta didik menjadi perhatian utama. Hakekatnya pendidikan berupaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak” (Dewantara, 2013). Pendidikan budi pekerti berfungsi membentuk peserta didik menjadi baik dan cerdas, tidak saja cakap terkait intelektual yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, namun juga cakap dalam karakter/watak. Kecakapan

peserta didik akan berdampak luas pada masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal tersebut yang mendasari secara filosofis perumusan salah satu tujuan hidup bernegara *the founding fathers* (para pendiri bangsa) yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan tersebut diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Pasal 3 yang menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Konsep dasar pendidikan nasional di atas hingga kini terus dipertahankan. Sebab kemajuan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) suatu bangsa harus disertai dengan penguatan iman dan taqwa (Imtaq). Hal tersebut saling terkait dan beriringan satu

sama lain agar pendidikan lebih bersifat komprehensif dan utuh untuk pengembangan kualitas warganegara. Meminjam istilah seorang ilmuwan yang sangat terkenal yakni Albert Einstein yang mengatakan bahwa “sains tanpa agama adalah lumpuh, agama tanpa sains adalah buta”.

Pendidikan budi pekerti menginspirasi awal konsep dasar PKn yang berfungsi mengembangkan karakter peserta didik. Karakter tersebut tergambar dari kemauan dan komitmen tinggi dalam belajar secara sungguh-sungguh, mandiri serta kerja keras guna meningkatkan kualitas diri yang lebih baik sehingga menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara. Dalam istilah Winataputra (2015) bahwa “esensi PKn sudah digagas jauh sebelum Negara Republik Indonesia lahir, antara lain melalui pendidikan budi pekerti di lingkungan perguruan Taman Siswa sebagai perguruan yang dibangun dan diselenggarakan dengan visi dan komitmen kebangsaan. Oleh karena itu pendidikan budi pekerti merupakan embrio atau konsep awal pendidikan kewarganegaraan”.

PKn dikatakan pendidikan budi pekerti karena karakteristik PKn yang

merupakan interdisipliner ilmu, maksudnya satu kesatuan dari beberapa disiplin ilmu lain yang memiliki keterhubungan dan keterpaduan terhadap karakter warganegara, diantaranya: pendidikan (budi pekerti), politik, filsafat, hukum, sejarah, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan agama. Namun khusus ilmu pendidikan dan ilmu politik menjadi inti (*core*) dalam membentuk kejiwaan dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam menunaikan hak dan kewajiban sebagai warganegara. Hal ini sesuai pernyataan Winataputra (2012) bahwa “PKn dapat dimaknai sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaaahnya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial-kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemology, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Hal tersebut yang menguatkan posisi dan peran PKn sebagai pendidikan budi pekerti yang bertujuan untuk mendorong penguatan karakter peserta didik. Secara konseptual-programatik

kualitas pribadi merupakan tujuan dan misi pendidikan kewarganegaraan dalam pemaknaan yang sangat luas. Esensi dari muatan dan misi tersebut secara konsisten terus diadopsi dalam berbagai kebijakan dan regulasi dalam rangka instrumentasi sistem pendidikan nasional (Winataputra, 2015). Kebijakan dan regulasi yang tepat bisa menjawab berbagai tantangan kewarganegaraan yang bersifat kompleks dan global dimana menggiring peserta didik untuk memiliki kualitas individu yang dapat diteladani baik pola pikir (*mindset*), sikap maupun perilaku ditengah kehidupan masyarakat. Hal demikian sesuai pernyataan Sunatra (2016) bahwa “dalam proses pendidikan budaya dan karakter, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, serta mengembangkan bangsa yang bermartabat”.

Dengan demikian dalam domain kurikuler, PKn termasuk sebagai pendidikan budi pekerti yang bertujuan untuk membentuk karakter dan watak peserta didik agar memiliki nilai dan moral dalam pergaulan hidup baik di lingkungan sekolah, lingkungan

masyarakat, dan lingkungan keluarga. Karakter demikian sebagai modal bagi peserta didik menjadi warganegara muda (*young citizens*) yang dapat diandalkan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Karakter menurut Udin S.Winataputra

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam domain kurikuler sebagai mata pelajaran di sekolah memiliki posisi dan peran yang sangat kuat dalam membentuk karakter peserta didik. Karakter terlihat dari pemahaman dan kesadaran peserta didik untuk bersikap demokratis terhadap pandangan yang berbeda, kepatuhan terhadap aturan sekolah, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air, bersikap sopan-santun, jujur, tanggung jawab, menjaga kebersihan, disiplin, dan menjaga kerapian dalam berpakaian. Pemberdayaan karakter peserta didik dilakukan sebagai upaya menjadikan warganegara yang cerdas dan baik (*good and smart citizen*) yang mampu mencegah meluasnya kerusakan moral siswa. Dalam pandangan Winataputra (2015) bahwa “PKn sebagai program kurikuler pendidikan demokrasi di

lembaga pendidikan formal (persekolahan) dan non formal (luar sekolah), yang berfungsi dan berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda serasi dengan potensinya agar menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius”.

Selain itu, PKn dilihat dari aspek domain sosial kultural dimana PKn harus berada ditengah masyarakat, berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mengenal (melek) tentang nilai-nilai karakter bangsa, baik pemahaman maupun pelaksanaannya sehingga secara cerdas dan bertanggung jawab dalam menangani setiap kegiatan kemasyarakatan. Senantiasa bersikap dan berperilaku demokratis dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, seperti menghargai keberagaman, mengakui hak asasi manusia (HAM), menjunjung prinsip kesetaraan, kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku, penyelesaian masalah secara damai, dan lain-lain. Menurut Winataputra (2015) bahwa “PKn dalam berbagai konteks mempunyai visi sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan

kewarganegaraan dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan dalam berbagai konteks”. Hal senada dikatakan Sapriya (2007) bahwa “program PKn dalam dimensi sosial kultural antara lain mencakup kegiatan untuk penanaman kebangsaan, sosial politik, bela negara, patriotisme, serta perbaikan nilai dan moral warga negara melalui berbagai organisasi kemasyarakatan”. Nilai dan moral menjadi pegangan bersama untuk saling membangun interaksi dan komunikasi, serta menjalin kerja sama yang baik.

Disamping itu, PKn diperkuat juga dengan misi untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, sebagaimana pernyataan Winataputra (2015), yaitu sebagai berikut:

1) Memfasilitasi warganegara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan memadai (*well-informed*); 2) Memfasilitasi warganegara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam

melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya itu; dan 3) Memfasilitasi warganegara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan politik.

Dari visi dan beberapa misi diatas, seyogyanya harus dimiliki warganegara jika berharap kehidupan demokratis bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dimana memfasilitasi warganegara dalam mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan yang berkembang. Hal tersebut merupakan peran media massa baik surat kabar, televisi, radio, majalah, maupun internet dalam memberitakan berita yang bersifat faktual dan aktual, serta akurat sehingga warganegara dapat mengkajinya secara obyektif, analitis, dan kritis sebelum melakukan sebuah penilaian atau menentukan pilihan sikap.

Selain itu, warganegara diberikan juga ruang untuk ikut serta dalam berpartisipasi baik dalam memberikan aspirasi, membangun opini, atau terlibat dalam sebuah kebijakan seperti memberikan pertimbangan dengan

pandangan yang bersifat solutif atas setiap permasalahan yang dikaji. Semuanya dilakukan semata-mata demi menguatkan karakter warganegara agar mandiri dan demokratis. Dengan wawasan dan pengalamannya tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama warganegara mampu memberikan kontribusi yang bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Inilah makna dari “*learning democracy, through democracy, and for democracy*” (Winataputra, 2001).

PKn sebagai suatu disiplin ilmu memang sangat dibutuhkan oleh warganegara. PKn memberikan penguatan dari aspek pemahaman dan keterampilan serta karakter warganegara. Apalagi dimasa saat ini, dimana karakter, nilai dan moral selalu menjadi kebutuhan utama dalam mengisi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ditengah kebebasan hidup yang semakin bebas nilai akibat dampak negatif dari globalisasi. Oleh karena itu PKn harus mendorong warganegara untuk bisa mengatasi berbagai tantangan dan peluang tersebut. Dalam istilah Winataputra (2015) “urgensi idiil, instrumental, dan praksis dari

pendidikan kewarganegaraan dalam konteks kebangsaan dan kebernegeraan Indonesia sebagaimana dibahas dimuka, mendorong perlunya dilakukan upaya akademis guna mengkonseptualisasi/merekonstruksi pendidikan kewarganegaraan sebagai entitas utuh”.

Paradigma PKn pada dasarnya bertolak dari dan merujuk kepada cita-cita, konsep, prinsip, dan praktis demokrasi konstitusional Indonesia, yang secara sengaja diturunkan dari Agama dan Pancasila, dan ilmu, terutama ilmu politik dan ilmu sosial lainnya yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia (Winataputra, 2015). Dengan kata lain PKn sebagai disiplin ilmu yang sarat dengan nilai-nilai dan moral telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dari sejak dulu hingga sekarang. Nilai-nilai dan moral tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Agama sehingga dijadikan pandangan hidup (*way of life*) bangsa. Melalui PKn, setiap warga negara dibekali dengan seperangkat kompetensi yang dapat diandalkan untuk pembangunan karakter bangsa yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sebagaimana

yang dikemukakan Winataputra (2015) bahwa:

Sebagai inti yang menjadi jantungnya dan merupakan benang emas yang mengikat unsur-unsur yang membangun tatanan yang koheren dari semua subsistem pendidikan kewarganegaraan adalah *civic knowledge*, yakni pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan, *civic disposition*, yakni nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan, dan *civic skills*, yaitu perangkat terampilan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warganegara.

Setiap warga negara harus mengetahui dan memahami keberadaannya sebagai warganegara, dimana letak hubungan dengan negara dan apa konsekuensi menjadi warga negara dalam bernegara, terutama terkait hak dan kewajibannya. Selain itu, warganegara juga harus memiliki berbagai keterampilan sehingga mampu memerankan isu-isu kewarganegaraan dengan baik. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi, pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan harus disertakan dengan pembawaan watak/karakter yang baik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

Ketika warganegara telah memiliki seperangkat kompetensi kewarganegaraan, maka tentu memiliki kewajiban dalam mengawal dan mengontrol kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan serta turut menghormati dan memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) yang bersifat pribadi dan masyarakat sehingga tercipta suatu kehidupan yang demokratis. Hal ini sesuai pendapat Winataputra (2015) bahwa:

Dampak sosial, instruksional, dan pengiring dari keseluruhan dimensi pendidikan kewarganegaraan tersebut diyakini dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang langgeng dan bermakna dalam proses tumbuh dan berkembangnya *civic virtue* dan *civic culture*, yang secara substansial dan praksis mencerminkan kualitas warganegara yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius, yang hidup sebagai bagian yang tak terpisahkan dari idealisme, instrumentasi, dan praksis masyarakat madani Indonesia.

Hakekatnya kebijakan kewarganegaraan (*civic virtue*) dan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan buah kompetensi kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kebijakan kewarganegaraan (*civic*

virtue) mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Semua unsur tersebut diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan “*civic community*” atau “*civil society*” atau masyarakat madani untuk Indonesia (Winataputra, 2015). Seperangkat kompetensi tersebut dapat diandalkan dalam menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi untuk kepentingan masyarakat, bangsa maupun negara, termasuk kepentingan dirinya sendiri.

Kebajikan kewarganegaraan sebagai modal sosial (*social kapital*) untuk mewujudkan suatu masyarakat madani (*civil society*), dimana masyarakat yang memahami betul hak dan kewajiban sebagai warganegara dengan hidup saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan perbedaan identitas sosial, sebagaimana pernyataan Winataputra (2015) bahwa “tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani bersifat interaktif dengan tumbuh dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*) yang merupakan unsur utama dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*)”. Hal

ini selaras dengan pernyataan Wahab dan Sapriya (2011) dalam konsep *Center for Civic Education* (CED) bahwa “kualitas kewarganegaraan itu disebut sebagai konsep kebajikan dan budaya kewarganegaraan (*civic virtue and civic culture*) yang mencakup penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*), serta keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*)”.

Dengan demikian paradigma PKn sebagai suatu program kurikuler menurut Udin S. Winataputra berperan sebagai pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk peserta didik sebagai warganegara muda (*young citizen*) agar memiliki karakter yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Agama. Sedangkan PKn dalam domain sosial-kultural berfungsi sebagai pendidikan karakter yang dapat mengembangkan karakter masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Profil Udin S. Winataputra

Udin S. Winataputra lahir di Sumedang, Jawa Barat, 07 Oktober

1945, umur 75 tahun, beliau adalah seorang Profesor Ilmu Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Terbuka (UT) dalam bidang keilmuan kurikulum dan pembelajaran dengan bidang kajian pendidikan ilmu pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Saat ini menjabat sekretaris Dewan Pembina Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) (sejak 2015) dan Ketua Umum Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) sejak tahun 2011.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Wahana Pendidikan Karakter menurut Pemikiran Udin S. Winataputra karena didasarkan pada dua

kajian bahwa: 1) pendidikan budi pekerti sebagai prakonsepsi PKn yang bertujuan untuk membentuk karakter dan watak peserta didik agar memiliki nilai dan moral berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Agama, dan 2) PKn dalam domain kurikuler berperan sebagai pendidikan karakter yang berfungsi menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa kepada peserta didik dalam kehidupan di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga. Sedangkan PKn dalam domain sosial-kultural berfungsi sebagai pendidikan karakter yang dapat mengembangkan karakter masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Karakter baik tersebut sebagai modal bagi warganegara dalam membangun kehidupan bangsa dan negara lebih adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, K. H. (2013). *Ki Hadjar Dewantara (I Pendidikan); pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka*. (Cetakan kelima). Jogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa bekerjasama dengan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Djahiri, A. K. (2006). *Esensi Pendidikan Nilai dan Moral dan PKn di Era Globalisasi dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Lab. PKn fpiips upi.
- Elkind, D. and Sweet, F. (2004). *How To Do Character Education*, dipublikasikan pada Issue of Today's School Sept/Oct 2004, under the title "You Are a Character Educator." Diakses dari <http://www.goodcharacter.com/Articles.html>. 28 Februari 2021.
- Gronbach. (1977). *Educational Psychology (3 rd edition)*. New York: Harcourt Brace Jovenovich, Inc.
- Hadi, S. (1989). *Metodologi Research*. [online]. Diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/44470/4/jiptummpp-gdl-adiirfanma-53932-4-babiii.pdf>. 28 Februari 2021.
- Kemendiknas (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (BP3K).
- Lickona, T. (2015). *Character Matters; How To Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues*. (Cetakan ketiga). Penerjemah oleh Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lickona, T. (2013). *Educating for character: how our school can teach respect and responsibility*. (Cetakan ketiga). Penerjemah oleh Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ljunggren, C. (2014). *Citizenship Education and National Identity: Teaching Ambivalence. Policy Futures in Education*, 12(1), hlm. 24-47.
- Mirzaqon T. A dan Budi Purwoko (2017). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan raktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal BK Unesa, 8(1).
- Muhadjir, N. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. [online]. Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15946/g.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>. 28 Februari 2021.
- Sapriya. (2007). *Perspektif pemikiran pakar tentang pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa*. (Disertasi). SPs UPI Bandung.
- Soemantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunatra. (2016). *Pendidikan Politik Kewarganegaraan*. Bandung: Lekkas.
- Wahab, A.A. dan Sapriya. (2001). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

- Winataputra, U.S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan; Refleksi Historis-Epistemologis dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Winataputra, U.S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Winataputra, U.S. (2006). *Meteri dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Winataputra, U. S. dan Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Wynne, E.A. (1991). *Character and academics in the elementary school* dalam Beningga, Jasques S. (Editor). *Moral, character, and civic education; in the elementary school*. New York and London: Teachers College Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.